



Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia

Fian Trinugraha

Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: fiantrinugraha97@gmail.com

Kata kunci:	ABSTRAK
Liberalisasi Perdagangan; Ketahanan Pangan; Indonesia; Kebijakan Pertanian; Perjanjian Perdagangan Global.	Penelitian ini mengkaji secara mendalam dampak liberalisasi perdagangan terhadap ketahanan pangan di Indonesia sebagai negara berkembang yang semakin terintegrasi dalam sistem perdagangan global. Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi sektor pertanian nasional, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas pangan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi ketahanan pangan, seperti perubahan kebijakan nasional, tekanan kompetisi dari produk impor, serta ketergantungan pada pasar global dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan kebijakan, penelitian ini menelaah bagaimana liberalisasi perdagangan memengaruhi ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas harga, dan kualitas pangan di Indonesia, serta dampaknya terhadap keberlanjutan sektor pertanian lokal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun liberalisasi perdagangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi pasar, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlemah daya saing petani lokal dan meningkatkan kerentanan terhadap gangguan rantai pasok pangan global. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang lebih adaptif, protektif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama, memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, serta mendorong praktik pertanian yang resilien untuk menjaga keamanan pangan nasional dalam jangka panjang.
Keywords:	ABSTRACT
Trade Liberalization; Food Security; Indonesia; Agricultural Policy; Global Trade Agreements.	<i>This study examines in depth the impact of trade liberalization on food security in Indonesia as a developing country that is increasingly integrated in the global trade system. Indonesia's active participation in various international trade agreements brings great opportunities and challenges to the national agricultural sector, especially in maintaining food sovereignty and stability. This study identifies key factors that affect food security, such as changes in national policies, competitive pressures from imported products, and dependence on global markets to meet food needs. Using a qualitative approach through literature and policy analysis, this study examines how trade liberalization affects the availability, accessibility, price stability, and quality of food in Indonesia, as well as its impact on the sustainability of the local agricultural sector. The findings suggest that while trade liberalization can drive economic growth and improve market efficiency, such policies also have the potential to weaken the competitiveness of local farmers and increase vulnerability to global food supply chain disruptions. Therefore, this study emphasizes the importance of formulating more adaptive, protective, and sustainable policies by integrating food security as a top priority, strengthening domestic production capacity, and encouraging resilient agricultural practices to maintain national food security in the long term.</i>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak awal terlibat dan mendukung liberalisasi perdagangan, bahkan sejak awal Orde Baru Indonesia sudah berorientasi kebijakan ekonomi yang bersifat liberal dan pro pasar (Simatupang & Puspitasari, 2017). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya

secara berdaulat dan mandiri (Ariawan, 2012a; Ariawan, 2012b; Jackson & Sørensen, 2013; Mantra, 2014). Kondisi demikian belum dapat diwujudkan manakala perdagangan bebas (*free trade*) atau liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) mulai diterapkan dalam perdagangan internasional yang memberikan konsekuensi bagi Indonesia untuk mengikutinya (Bawon, 2020).

Perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara tanpa dikenai pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya (Kurnianingrum et al., 2021; Serlika Aprita et al., 2020). Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan dalam perdagangan antar individu dan perusahaan yang berada di negara yang berbeda (Amaliyah, 2013; Musjtari, 2014).

Keragaman sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan keuntungan yang sangat besar dalam rangka mendukung peningkatan konsumsi masyarakat menuju ketahanan pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Berbagai sumber pangan lokal dan makanan tradisional yang saat ini dimiliki oleh seluruh wilayah, masih dapat terus dikembangkan untuk memenuhi keanekaragaman pangan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan.

Pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap individu karena pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Selain itu, pemenuhan pangan bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban moral, sosial, dan hukum. Menjamin ketahanan pangan juga merupakan salah satu upaya dalam membentuk sumber daya manusia yang lebih baik untuk melaksanakan pembangunan nasional, serta sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Isu ketahanan pangan mulai menjadi pembahasan negara-negara di dunia sejak tahun 1970an ketika terjadinya krisis pangan global. Pada saat itu fokus utama negara-negara dalam membahas ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan harga bahan-bahan pangan pokok, baik di tingkat global maupun nasional.

Salah satu pangan yang menjadi bahan pangan pokok utama dan strategis di dunia adalah beras, baik di negara berkembang maupun negara maju. Beras dikonsumsi oleh setengah dari tujuh miliar penduduk di dunia, lebih dari 90 persen dikonsumsi oleh penduduk di Asia serta lebih dari 22 persen dikonsumsi oleh penduduk di Asia Tenggara. Selain itu, beras juga berperan penting terkait dengan kebutuhan gizi masyarakat. Bahkan bagi sebagian masyarakat, beras juga menjadi komponen sentral dalam budaya sejumlah komunitas.

Di sisi lain, lebih dari 200 juta petani memproduksi padi dengan skala usaha kurang dari satu hektar dan budidayanya menjadi aktivitas ekonomi utama yang melibatkan banyak kelompok masyarakat miskin. Beras juga berperan sebagai standar upah pekerja pada sektor pertanian tanaman pangan ataupun nonpertanian. Peran dualitas ini sering memunculkan konflik dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, apakah akan mengintervensi dengan melindungi petani ketika harga turun atau melindungi konsumen ketika harga naik.

Perdagangan beras yang tipis dan eskalasi persaingan pasar melalui pembentukan pasar tunggal di ASEAN pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan untuk mempertahankan ketahanan pangan jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan

karakteristik dari produksi padi yang didominasi oleh petani berskala usaha kecil namun menjadi komoditas pangan yang dibutuhkan oleh banyak orang.

Sedangkan di sisi lain, perubahan preferensi konsumen akibat perubahan pendapatan kelas menengah direspon untuk mengantisipasi perkembangan permintaan beras dan substitusi komoditas lainnya seperti ubi kayu dan jagung. Selain itu, volatilitas harga beras juga menjadi sinyal bagi produsen untuk masuk pasar dan mempengaruhi daya beli konsumen. Produksi, konsumsi, dan harga beras, baik di dalam maupun luar negeri, menjadi faktor-faktor esensial yang perlu mendapat perhatian bagi pembuat kebijakan perberasan dan sekaligus ketahanan pangan (Benazir Bona Pratamawaty et al., 2019; Ranitya Kusumadewi, 2020).

Diskursus mengenai ketahanan pangan pada tahun-tahun berikutnya mengalami berbagai perkembangan. Komunitas internasional pun telah sepakat untuk menetapkan tujuan dan tindakan internasional dalam ketahanan pangan, dimana tindakan dan tujuan tersebut ditujukan pada upaya untuk mengurangi jumlah orang yang kelaparan hingga setengahnya pada tahun 2015. Keterbatasan pangan dalam suatu negara dapat berdampak buruk bagi kondisi sosial dan ekonominya. Dengan demikian, ketahanan pangan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, hak asasi manusia serta kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Kebijakan pangan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan perberasan nasional, seperti dari kesepakatan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan komoditas pertanian di negara-negara mitra dagang Indonesia, perubahan sosial ekonomi global yang berdampak pada gejolak harga pangan, serta perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas pertanian (Balitbangtan, 2016; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2015; Hermanto et al., 2015; Manurung, 2014). Ketahanan pangan di Indonesia selalu diartikan sebagai swasembada.

Pandangan inilah yang menjadi motif utama dalam pengerahan sumberdaya yang besar untuk meningkatkan produksi beras untuk mencapai tujuan swasembada tersebut. Swasembada beras merupakan tuntutan publik dan memiliki nuansa politis yang kuat, karena beras memiliki kedudukan yang vital dan fatal. Vital karena beras merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, dan fatal jika penyediaannya kurang dapat dijadikan alat oleh kekuatan politik baik yang sedang berkuasa maupun yang berada di luar kekuasaan saat ini, sehingga dapat menyebabkan instabilitas sosial dan politik dalam negeri (Badan Ketahanan Pangan, 2012; Gardita, 2015; Handewi P. Saliem et al., n.d.; Nono Rusono et al., 2014).

Sebagai negara dengan populasi penduduk yang besar, Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Di Indonesia, ketahanan pangan masih merupakan isu yang sangat penting karena beberapa alasan, yaitu masih banyak masyarakat yang berada pada kondisi kerawanan pangan, tingkat pertumbuhan penduduk, migrasi internal dan urbanisasi yang tinggi menyebabkan peningkatan permintaan pangan. Selain itu, peningkatan pendapatan dan daya beli mengakibatkan perubahan pola nutrisi.

Di sisi lain, kapasitas produksi pangan nasional cenderung terus menurun akibat terjadinya konversi lahan sawah ke non-pertanian, degradasi ketersediaan air dan jaringan irigasi, serta terjadinya kompetisi dalam penggunaan lahan dan air yang semakin ketat. Harga pangan meningkat dari waktu ke waktu dan volatil karena globalisasi, gejolak keuangan, spekulasi dan meningkatnya kompetisi penggunaan pangan untuk sumber energi.

Perdagangan dapat mendukung tujuan ketahanan pangan melalui dampaknya terhadap pendapatan, ketersediaan dan harga. Perdagangan akan meningkatkan pendapatan melalui

peningkatan produktivitas komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara yang memiliki surplus pangan dapat mendukung pangan dan menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk mengimpor komoditas yang tidak diproduksi lokal dengan harga lebih murah dibandingkan dengan jika memproduksi sendiri. Peningkatan produksi dan produktivitas ini mendukung pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan dan karenanya kemampuan untuk membeli pangan akan meningkat.

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan ke depan adalah bagaimana Indonesia dapat menghadapi ketahanan pangan yang akan memperkuat integrasi pencapaian ketahanan pangan nasional yang lebih kuat, sehingga bisa berjalan lebih efisien dan efektif disertai adanya jaminan atas ketersediaan pasokan komoditas pangan di pasar, dengan harga yang terjangkau serta mempunyai kualitas gizi yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ketahanan pangan Indonesia dan mengidentifikasi strategi kebijakan yang diperlukan untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini mengangkat masalah mengenai pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Pembatasan masalah difokuskan pada tantangan globalisasi dan perdagangan bebas, dimana pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Indonesia untuk diekspor namun juga meningkatkan masuknya produk impor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, kualitas produksi pangan, daya saing, jaringan pemasaran, serta penguasaan teknologi. Kegunaan penelitian ini mencakup aspek akademis, sebagai bahan kajian dalam bidang Hubungan Internasional, dan kegunaan praktis untuk memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perdagangan di Indonesia dari perspektif Liberalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena liberalisasi perdagangan dan ketahanan pangan secara mendalam dan komprehensif. Penelitian ini berupaya memahami dan menjelaskan bagaimana liberalisasi perdagangan ASEAN mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia melalui analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan resmi, dan literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, publikasi resmi ASEAN, jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku teks yang relevan, serta laporan penelitian terdahulu yang membahas tema liberalisasi perdagangan dan ketahanan pangan. Sumber data primer meliputi dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, dokumen ASEAN Integrated Food Security Framework, dan AEC Blueprint 2025. Sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel, dan publikasi penelitian yang membahas topik terkait.

Data yang dikumpulkan meliputi data kualitatif tentang perkembangan kebijakan perdagangan ASEAN, program ketahanan pangan Indonesia, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), serta dampak liberalisasi perdagangan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Data kuantitatif pendukung berupa statistik produksi dan konsumsi beras, data impor-ekspor komoditas pangan, dan indikator ketahanan pangan nasional juga dikumpulkan untuk memperkaya analisis.

Analisis data menggunakan teknik analisis konten terhadap dokumen-dokumen kebijakan dan literatur terkait. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: pertama, identifikasi dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama penelitian yaitu liberalisasi perdagangan, ketahanan pangan, dan kebijakan nasional. Kedua, interpretasi data dengan menggunakan kerangka teori liberalisasi perdagangan dan konsep ketahanan pangan sebagai landasan analisis. Ketiga, sintesis temuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, dan implikasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena liberalisasi perdagangan ASEAN dan dampaknya terhadap ketahanan pangan Indonesia, kemudian menganalisis hubungan kausal antara kedua variabel tersebut dengan mempertimbangkan konteks kebijakan nasional dan regional. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberlakuan ASEAN dan Perubahan dalam Dimensi Indonesia

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan sejak 31 Desember 2015 membawa perubahan signifikan dalam lanskap perdagangan regional Asia Tenggara. MEA bertujuan mewujudkan integrasi ekonomi kawasan melalui empat pilar utama: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Integrasi ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara-negara anggota ASEAN melalui penciptaan pasar yang lebih luas, peningkatan efisiensi produksi, dan transfer teknologi.

Bagi Indonesia, implementasi MEA membawa dampak multidimensi terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Di satu sisi, MEA membuka peluang ekspor produk pertanian Indonesia ke pasar ASEAN yang lebih luas dengan total populasi lebih dari 600 juta penduduk. Produk-produk pertanian unggulan Indonesia seperti kopi, kakao, kelapa sawit, dan rempah-rempah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pangsa pasar di kawasan regional. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa masuknya produk pertanian dari negara ASEAN lainnya, terutama Thailand, Vietnam, dan Myanmar yang memiliki daya saing tinggi dalam komoditas beras, yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan produksi domestik.

Liberalisasi ekonomi yang tidak terkendali berpotensi menjebak perekonomian pada situasi pertumbuhan semu, di mana ekonomi tumbuh tinggi tetapi sangat sedikit yang dapat merasakan manfaatnya. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk melakukan penyesuaian kebijakan guna mengoptimalkan peluang sekaligus memitigasi risiko yang ada. Integrasi produk pertanian di ASEAN bertujuan untuk penguatan integrasi di tingkat regional melalui liberalisasi dan fasilitasi di tingkat barang, jasa dan investasi serta promosi partisipasi swasta

dalam liberalisasi produk pangan. Ukuran-ukuran implementasi termasuk pengurangan tarif, ukuran non-tarif, kerjasama kepabeanan, implementasi skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), pengaturan *Rules of Origin* (ROO), standarisasi, investasi dan layanan jasa.

Tabel 1. Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Implikasinya

Pilar MEA	Karakteristik	Implikasi untuk Indonesia
Pasar Tunggal	Aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil	Peluang ekspor produk pangan dan risiko kompetisi produk impor
Daya Saing	Kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, HKI, infrastruktur, dan perpajakan	Kebutuhan peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian
Pembangunan Merata	Pengembangan UKM dan inisiatif integrasi ASEAN	Pemberdayaan petani kecil dan pengembangan agribisnis
Integrasi Global	Pendekatan koheren dalam hubungan ekonomi eksternal	Koordinasi kebijakan perdagangan nasional dengan komitmen regional

Sumber: Diolah dari berbagai sumber kebijakan ASEAN

Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Sektor Pangan

Indonesia telah menaruh perhatian khusus pada kondisi yang terjadi di sektor pangan sejak tahun 2009. Indonesia berinisiatif membentuk Priority Integration Sectors (PIS), serta terlaksananya realisasi integrasi ASEAN di bidang pertanian yang disebut dengan ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS) dan Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security (SPA-AFS). Kedua inisiatif tersebut diangkat dalam pertemuan ASEAN 2009 dan diimplementasikan selama periode 5 tahun (2009-2014), dengan harapan akan memperkuat ketahanan pangan, penyediaan pasar, dan mendorong pertumbuhan di sektor pangan.

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan sektor pangan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari sisi produksi, Indonesia memiliki potensi besar dengan lahan pertanian yang luas dan keragaman komoditas. Sejak tahun 2005-2014, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menemukan dan melepas berbagai jenis benih tanaman pangan untuk dapat dibudidayakan oleh masyarakat petani Indonesia dengan jumlah varietas baru yang terdaftar sebesar 844 jenis. Berbagai program pendukung juga telah dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendorong hasil produksi tanaman pangan Indonesia, seperti kegiatan penyediaan benih bersubsidi, peningkatan jumlah produksi benih unggul yang bersertifikasi serta melakukan kegiatan sosialisasi perbenihan pertanian di pedesaan.

Namun demikian, produktivitas pertanian Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam. Kedua, dari aspek kebijakan, pemerintah telah menyusun berbagai regulasi dan program untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Keseriusan Indonesia dalam menanggapi isu ketahanan pangan dicerminkan dengan dibuatnya UU Pangan No. 18 Tahun 2012 tentang Lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Pangan. UU tersebut meliputi perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, label dan iklan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat, dan pendidikan.

Dalam konteks perberasan, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Di satu sisi, Indonesia menargetkan swasembada beras untuk menjamin ketahanan pangan. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan menuntut efisiensi dan daya saing yang tinggi. Kondisi ini memerlukan transformasi struktural sektor pertanian, dari yang berbasis subsisten menuju agribisnis yang modern dan efisien. Mencermati anggaran negara beberapa tahun terakhir terlihat betapa minimnya dukungan yang diberikan pemerintah bagi pengembangan sektor pangan domestik baik dari segi produksi hingga distribusi. Realisasi anggaran untuk ketahanan pangan yang dalam APBN 2011 senilai 31,7 triliun rupiah dan pada tahun 2012 naik menjadi 42,3 triliun rupiah atau kurang dari 3 persen total belanja negara yang mencapai 1.435,4 triliun rupiah, jumlah yang sangat kecil untuk mendukung sektor strategis ini.

Rancangan dan Implementasi Ketahanan Pangan

Pemerintah Indonesia telah merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi untuk menjaga ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan panganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal menuju kedaulatan dan kemandirian pangan. Visi ini mencerminkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Strategi ketahanan pangan mencakup diversifikasi pangan, penguatan sistem distribusi, peningkatan produktivitas pertanian, dan pemberdayaan petani. Program diversifikasi pangan bertujuan mengurangi ketergantungan pada beras dan mendorong pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, dan sagu. Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal menjadi fokus utama program ini. Hal ini sejalan dengan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah, dimana setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi komoditas pangan lokalnya.

Implementasi kebijakan ketahanan pangan juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan, dan Bulog. Koordinasi antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan mengemban misi untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal, memantapkan penanganan kerawanan pangan, meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok, mewujudkan panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal, serta mewujudkan keamanan pangan segar.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem cadangan pangan untuk mengantisipasi krisis pangan dan menjaga stabilitas harga. Sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 meliputi meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam, menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman, meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi, dan tercapainya keamanan pangan segar. Implementasi program-program ini memerlukan koordinasi yang kuat dan komitmen dari semua pemangku kepentingan.

Tabel 2. Program Ketahanan Pangan Indonesia

Program	Tujuan	Implementasi
Diversifikasi Pangan	Mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal	Kampanye konsumsi pangan beragam, pengembangan produk olahan pangan lokal
Peningkatan Produktivitas	Meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi pertanian	Penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian, penyuluhan
Stabilisasi Harga	Menjaga stabilitas harga pangan untuk produsen dan konsumen	Operasi pasar, cadangan beras pemerintah, pengaturan impor
Pemberdayaan Petani	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani	Pelatihan, akses kredit, pengembangan kelompok tani, asuransi pertanian

Sumber: Diolah dari dokumen kebijakan Kementerian Pertanian

Peran Indonesia di ASEAN dalam Bidang Pangan

Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN yang telah berperan aktif dalam berbagai bidang, termasuk bidang pangan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber pangan, sehingga memiliki peran penting dalam bidang pangan di ASEAN. Ketahanan pangan sudah lama menjadi agenda penting di ASEAN. Fluktuasi harga yang tinggi dan krisis keuangan global yang dimulai pada tahun 2008 mendorong ASEAN untuk mengambil pendekatan yang strategis dan komprehensif terhadap ketahanan pangan jangka panjang di wilayah ini.

Para pemimpin ASEAN dalam rangka menjamin keamanan pangan jangka panjang dan untuk meningkatkan pendapatan petani di kawasan ASEAN telah menyepakati Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN (ASEAN Integrated Food Security Framework - AIFS) dan Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan ASEAN (Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security - SPA-AFS) pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009. Komponen kunci dari kerangka kerja kesepakatan tersebut adalah memperkuat ketahanan pangan dan bantuan darurat/kelangkaan sebagai langkah inti dalam penanganan ketahanan pangan di wilayah ini.

Kerangka kerja ini memiliki tujuan untuk memperkuat program dan kegiatan ketahanan pangan nasional, mengembangkan prakarsa dan mekanisme cadangan keamanan pangan regional. Produksi pangan yang berkelanjutan menjadi aspek penting dari pengamanan ketahanan pangan. Hal ini dapat diraih melalui peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, meminimalkan kerugian pasca-panen, mengurangi biaya transaksi, mempromosikan inovasi pertanian termasuk di dalamnya penelitian dan pengembangan produktivitas pertanian, dan mempercepat transfer dan penerapan teknologi baru.

Kerangka AIFS juga mencakup penyediaan pasar produk pangan yang kondusif untuk pengembangan perdagangan pangan yang berkelanjutan, mendorong investasi publik dan swasta yang lebih besar di sektor pangan, pengembangan industri berbasis agro, dan memperkuat sistem informasi ketahanan pangan yang terintegrasi.

Tantangan dan Peluang Liberalisasi Perdagangan

Liberalisasi perdagangan ASEAN menghadirkan tantangan dan peluang yang kompleks bagi ketahanan pangan Indonesia. Tantangan utama meliputi volatilitas harga akibat dinamika pasar regional, ketergantungan impor yang meningkat, tekanan terhadap petani kecil akibat

kompetisi dengan produk impor yang lebih murah, kerentanan terhadap gejolak ekonomi regional, konversi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian, degradasi lahan dan sumber daya air, serta dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian. Studi tentang dampak liberalisasi perdagangan terhadap pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan potensial memperluas akses pasar untuk Indonesia khususnya ke negara industri, namun juga meningkatkan risiko ketergantungan impor.

Di sisi lain, liberalisasi juga membuka peluang ekspor produk pertanian Indonesia ke pasar ASEAN yang lebih luas dengan populasi lebih dari 600 juta jiwa. Peluang lain termasuk transfer teknologi dan pengetahuan dari negara-negara mitra ASEAN, diversifikasi sumber pangan untuk meningkatkan keamanan pangan nasional, peningkatan investasi di sektor pertanian baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta mendorong modernisasi dan efisiensi sistem produksi pertanian. Penurunan tarif pada berbagai pasar ekspor utama akan memperluas akses pasar Indonesia. Beberapa produk ekspor utama Indonesia akan mengalami pemotongan tarif cukup besar di pasar ekspor utama, termasuk komoditas kayu, kertas, produk mineral, biji berminyak, kopi, teh, kakao, buah-buahan dan sayuran.

Untuk mengoptimalkan peluang dan memitigasi risiko, Indonesia perlu mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan daya saing produk pertanian melalui modernisasi teknologi dan inovasi, penguatan infrastruktur pertanian dan logistik untuk mengurangi biaya transaksi, pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, kebijakan perdagangan yang seimbang antara proteksi sektor domestik dan keterbukaan pasar, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani, serta pengembangan sistem informasi pasar yang terintegrasi. Hal ini memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan petani.

Tabel 3. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Ketahanan Pangan

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Ketersediaan Pangan	Diversifikasi sumber pangan, akses ke pasar regional yang lebih luas	Ketergantungan impor, kerentanan terhadap gejolak pasar global
Harga Pangan	Kompetisi meningkatkan efisiensi dan dapat menstabilkan harga	Volatilitas harga tinggi, tekanan harga jual petani
Produksi Domestik	Dorongan modernisasi, transfer teknologi, peningkatan investasi	Tekanan kompetisi, marginalisasi petani kecil berskala subsisten
Akses Pasar	Peluang ekspor ke pasar ASEAN 600+ juta jiwa	Kompetisi ketat dengan produk negara ASEAN lain yang lebih efisien

Sumber: Diolah dari berbagai studi dampak liberalisasi perdagangan

KESIMPULAN

Liberalisasi perdagangan ASEAN membawa dampak ganda bagi ketahanan pangan Indonesia. Di satu sisi, integrasi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka peluang ekspor, memperluas akses pasar, mempercepat transfer teknologi, dan mendorong modernisasi sektor pertanian. Diversifikasi sumber pangan regional juga berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, di sisi lain liberalisasi ini menghadirkan tantangan serius seperti volatilitas harga pangan, meningkatnya ketergantungan impor pada komoditas strategis, tekanan kompetitif terhadap petani kecil, kerentanan terhadap gejolak ekonomi global, serta ancaman konversi lahan pertanian akibat urbanisasi dan industrialisasi.

Sebagai respons, Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan lokal, peningkatan produktivitas, penguatan distribusi dan cadangan pangan, stabilisasi harga, serta pemberdayaan petani. Untuk memaksimalkan manfaat liberalisasi sekaligus memitigasi risiko, dibutuhkan kebijakan komprehensif yang mencakup peningkatan daya saing pertanian berbasis teknologi, penguatan kapasitas petani dan kelembagaan, pengembangan industri hilir bernilai tambah, serta kebijakan perdagangan yang seimbang antara keterbukaan dan perlindungan sektor strategis. Dengan pendekatan yang terarah dan sinergi antar pemangku kepentingan, liberalisasi ASEAN dapat menjadi katalis transformasi menuju sistem pangan Indonesia yang lebih modern, kuat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, R. (2013). Mengimpor kedelai: Perluah terus dilanjutkan? (Pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap perkedelaaian Indonesia). *Global and Policy Journal of International Relations*, 1(01).
- Ariawan. (2012). *Perjanjian perdagangan bebas dalam era liberalisasi perdagangan: Studi mengenai ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) yang diikuti oleh Indonesia* (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Universitas Indonesia.
- Asih, K. (2019). *Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan*. Badan Ketahanan Pangan.
- Badan Ketahanan Pangan. (2012). *Road map diversifikasi pangan* (Edisi 2). Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Badan Sektoral. (2017). *Pilar masyarakat ekonomi ASEAN: Bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN*. Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia.
- Balitbangtan. (2016). *Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2015–2019* (Edisi revisi). Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Bawon, S. P. (2020). Dampak perdagangan bebas pada era globalisasi di Indonesia dalam UU No. 44 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas. *Lex Privatum*, 8(2).
- Benazir Bona Pratamawaty, Dewi, E. A. S., & Trulline, P. (2019). Strategi komunikasi politik dalam sosialisasi kebijakan ekonomi ASEAN. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(2), 211–223.
- Gardita, B. (2015). *Ketahanan pangan nasional*. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Handewi P. Saliem, et al. (n.d.). *Dampak liberalisasi perdagangan terhadap kinerja ketahanan pangan*.
- Hermanto, Retno S. H. M., Sulaeman, Y., et al. (2015). *Penelitian dan pengembangan pertanian menuju 2030: Outlook transformasi pertanian bioindustri*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to international relations: Theories and approaches* (5th ed.). Oxford University Press.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2015). *Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2015–2019*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kurnianingrum, T. P., Cahyaningrum, D., Nola, L. F., & Novianti, S. (2021). *Pelindungan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional*. Publica Indonesia Utama.
- Mantra, D. (2014). *Hegemoni dan diskursus neoliberalisme*. Jakarta.

- Manurung, R. (2014). *Pengembangan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan*. Materi Sosialisasi Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015–2045, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.
- Musjtari, D. N. (2014). Dampak liberalisasi perdagangan dalam WTO agreement terhadap ketahanan pangan Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 221–246.
- Nono Rusono, Sunari, A., Muharam, A., Avianto, N., Martino, I., Susilawati, Tejaningsih, & Hadi, P. U. (2014). *Penyusunan RPJMN 2015–2019 bidang pangan dan pertanian*. BAPPENAS Republik Indonesia.
- Patunru, A. A., & Ilman, A. S. (2019). *Ekonomi politik kebijakan beras di Indonesia: Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Center for Indonesian Policy Studies.
- Ranitya Kusumadewi. (2020, 25 Februari). *Pemanfaatan persetujuan perdagangan internasional di forum ASEAN dan mitra ASEAN*. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Serlika Aprita, Rio Adhitya, & Sh, M. K. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Simatupang, A., & Puspitasari, V. A. (2017). Dampak liberalisasi perdagangan beras terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2007–2010. *Business Management Journal*, 8(1).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.